

Pelayanan Publik Berbasis *Collaborative Governance* di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru

Jum Harianto Fatman^{1*}, Nurlinah², Suhardiman Syamsu³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to describe collaborative governance-based public services at Andi Mattalata Port, Barru Regency. This type of research uses a descriptive research type in order to provide an overview of qualitative research data. This research focuses on how to describe the collaboration of stakeholders at Andi Mattalata port. This study used several methods, namely interviews, observation and documentation as techniques in data collection. The results of this study provide an explanation of the theory of Ansell and Gash in (Wibowo, 2020) put forward several stages for measuring, namely a) Face to Face; b) Trust Building; c) Commitment to Processes; d) Share Understanding; e) Intermediate Outcomes. Technical constraints occur because the initial commitment process did not go well resulting from being inconsistent with the initial face-to-face talks which hindered the continuation of cooperation between stakeholders who work together in carrying out passenger and freight services, but this can be minimized by emotional factors that occur by the parties working together so that the service can run even though it is not optimal.

Keywords: collaborative governance, ports, services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan publik berbasis *collaborative governance* di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif agar memberikan gambaran terhadap data penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran kolaborasi dari *stakeholder* di Pelabuhan Andi Mattalata. Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan dari teori Ansell dan Gash dalam (Wibowo, 2020) mengemukakan beberapa tahapan untuk mengukur yaitu a) *Face to Face*; b) *Trust Building*; c) *Comitment to Prosses*; d) *Share Understanding*; e) *Intermediate Outcomes*. Kendala teknis terjadi karna proses komitmen awal tidak berjalan dengan baik yang diakibatkan dari tidak konsisten dengan pembicaraan awal di tahap *face to face* sehingga menghambat dalam keberlangsungan kerja sama antara *stakeholders* yang bekerja sama dalam melakukan pelayanan penumpang dan barang, namun hal tersebut bisa diminimalisir oleh faktor emosional yang terjadi oleh pihak yang bekerja sama sehingga pelayanan dapat berjalan walaupun tidak makaksimal.

Kata kunci: collaborative governance, pelabuhan, pelayanan

* jum.hehe86@gmail.com

PENDAHULUAN

Collaborative governance secara konsep merupakan kegiatan yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra dan *partner* kerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan barang dan pelayanan (Dewi, 2019). Konsep tersebut selaras dengan konsep NPM atau *New Public Management* yang menganggap manajemen pada sektor swasta lebih baik dari manajemen pemerintahan, makanya pemerintah melakukan kerja sama dalam berbagai hal, salah satunya dari segi pelayanan.

Potensi kelautan Garongkong dapat dikelola menjadi sebuah pelabuhan sehingga pada tahun 2008 terdapat wacana pemerintah daerah Kabupaten Barru untuk membuat sebuah pelabuhan dan kemudian disahkan oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru dalam perda tersebut berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perda tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Barru dalam hal ini

Lingkungan Garongkong akan dibangun sebuah pelabuhan sesuai dengan sistem jaringan transportasi laut nasional. Sehingga pada tahun 2008 hingga 2013 telah dilakukan pembangunan tahap pertama.

Melihat potensi daerah dan wilayah-wilayah yang dapat dikembangkan dan diharapkan menjadi salah satu andalan perekonomian, maka Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan akan mengembangkan kawasan maritim sebagai urat nadi perekonomian. Program strategis kabupaten ini adalah pengembangan industri dan sektor perekonomian bagi Kabupaten Barru dan sekitarnya.

Daerah Kabupaten Barru, memerlukan adanya pintu gerbang bagi transportasi moda perhubungan laut yang memadai. Dalam rangka menunjang aktivitas distribusi barang antar pulau guna memperlancar roda perekonomian maka dibuat rencana pembangunan Kawasan pelabuhan di Garongkong yang terletak di Desa Garongkong, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana pemindahan IKN atau ibu kota negara berdampak kepada daerah-daerah sekitar IKN. Daerah-daerah berbenah pada sektor pembangunan infrastruktur maupun

transportasi. Begitupun dengan Pelabuhan Andi Mattalata mengalami perkembangan pesat. Perkembangan pesat ini merupakan langkah untuk mendukung IKN yang baru di Kalimantan.

Rute penyeberangan Pelabuhan Andi Mattalata untuk sementara melayani 2 rute penyeberangan yaitu penyeberangan Barru–Batu Licin dengan Barru–Pacitan. Penyeberangan Barru-Batu Licin menggunakan jasa penyeberangan KMP Awu-Awu yang melayani jasa penyeberangan penumpang dengan barang. Jadwal keberangkatan dari Kabupaten Barru pada hari jumat dan melayani keberangkatan 1 minggu sekali. Sedangkan untuk penyeberangan Barru-Pacitan biasanya melayani 2 minggu sekali. dengan menggunakan jasa penyeberangan Kapal Ferry Dharma Kencana.

Pelabuhan Garongkong merupakan pilihan tepat sebagai pelabuhan penyangga dari keberadaan pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar dan pelabuhan Ujungnge, Pare-pare. Kedua pelabuhan ini mengalami kejenuhan akibat peningkatan arus barang dan penumpang yang pesat. Lokasi pelabuhan garongkong relatif dekat dengan kedua pelabuhan tersebut dan mempunyai akses langsung ke jalan

Provinsi Makassar-Pare-pare serta mempunyai garis pantai yang ideal ke arah alur laut.

Segala bentuk kegiatan di pelabuhan umumnya punya tugas fungsi masing-masing yang tentunya menjadi kesepakatan Bersama yang kemudian di pedomani sebagai aturan yang di sepakati bersama. Kesepakatan akan memperkuat kolaborasi bagi setiap stakeholder. Masalah-masalah tersebut sering sekali didapatkan diberbagai kantor-kantor pemerintahan maupun penyedia jasa lainnya seperti di penyedia jasa transportasi. Indonesia dalam pengelolaan transportasi baik darat, udara dan laut tidak pernah absen dari keluhan yang diberikan oleh masyarakat pengguna jasa layanan transportasi. Biasanya permasalahan pelayanan terjadi karena kolaborasi dari setiap *stakeholder* tidak berjalan dengan baik. Begitupun terjadi di Pelabuhan Andi Mattalatta Barru yang tergolong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 Menjelaskan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru dalam perda tersebut berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal tersebut mendasari bahwa pelayanan publik yang menjadi hal dasar yang harus diterima masyarakat mestinya

mempunyai kualitas yang layak sesuai dengan standar pelayanan minimal, namun yang terjadi dilapangan masih banyak penunjang pelayanan belum terpenuhi sebagai mana semestinya sebuah pelabuhan pada umumnya.

Pelayanan publik di Pelabuhan Andi Mattalata terbagi atas dua yaitu pelayanan penumpang dengan pelayanan barang. Pelayanan penumpang dilakukan pada saat kedatangan maupun keberangkatan kapal. Pelayanan yang terjadi dilakukan oleh Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan pihak Koperasi TKBM sebagai penyedia jasa bongkar muat. Dinas Perhubungan dengan Koperasi TKBM bekerja sama dalam pelayanan penanganan penumpang maupun barang.

Pelayanan barang yang dimaksudkan adalah pelayanan pengangkutan barang yang berat. Biasanya bongkar muat diperlihatkan pada saat sebelum keberangkatan penumpang. Barang bawaan yang terdiri berbagai jenis baik buah-buahan maupun hewan ternak biasanya dimuat kembali di area pelabuhan dan hal tersebut membutuhkan bantuan dari koperasi TKBM. Karena barang yang banyak harus dimuat kembali ke kapal tentunya pihak kapal maupun dari pihak

dari Dinas Perhubungan juga butuh bantuan tenaga dari Koperasi TKBM.

Namun dari kedua pelayanan tersebut terdapat beberapa kendala antara lain pada pelayanan penumpang saat menjelang keberangkatan pihak Dinas Perhubungan belum memberikan ruang tunggu yang memadai untuk penumpang begitu pun dengan pelayanan barang yang menuju kapal infrastruktur penunjang untuk mengangkut barang masih belum memadai sehingga cenderung menyusahkan untuk salah satu pihak yang berkolaborasi.

Kerja sama dalam melakukan sebuah pekerjaan merupakan ciri masyarakat Indonesia, hal tersebut selaras dengan konsep sekarang di pemerintahan yaitu melakukan kolaborasi atau sering dikenal dengan konsep *collaborative governance*. Secara konsep *collaborative governance* merupakan kegiatan yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra dan *partner* kerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan barang dan pelayanan (Dewi, 2019).

Collaborative Governance menekankan enam kriteria yaitu: (1) forum ini diprakarsai oleh lembaga

publik atau lembaga; (2) peserta dalam forum termasuk aktor swasta; (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik; (4) terorganisir; (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan; (6) fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik (Ansell & Gash, 2007).

Strategi baru *governance* dalam dua dekade terakhir, yaitu *collaborative governance* yang muncul sebagai gaya baru untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. *Collaborative governance* merupakan bentuk baru dari *governance* yang muncul sebagai strategi baru dalam memerintah dengan mengikut sertakan *stakeholders* seperti aktor swasta atau privat dan aktor pemerintah tetap menjadi aktor *final* dalam pengambilan keputusan (Ansell, 2007).

Kolaborasi pemerintah yaitu tata kelola pemerintahan yang melibatkan banyak aktor baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik dan penyediaan serta pengelolaan asset publik. Kolaborasi

pemerintah muncul sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang semakin kompleks dan bersifat independen, serta rendahnya SDM yang dimiliki pemerintah dan tingginya biaya penerapan suatu program. Keterlibatan pihak lain dari sektor swasta dan NGO menjadi unsur penting dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik.

Pendapat yang dikemukakan oleh Freeman dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan bahwa para *stakeholder* harus terlibat dalam segala tahapan proses pembuatan keputusan, walaupun otoritas tertinggi terletak pada aktor publik, tetapi semua *stakeholders* memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hasil kebijakan. Karena tujuan dari kolaborasi adalah mencapai tingkat kesepakatan antara *stakeholders*. Connick dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan kolaborasi yaitu salah satu pemecahan masalah yang melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat. Lanjut *collaborative governance* juga didefinisikan sebagai proses untuk menetapkan, mengarahkan, memfasilitasi, dan mengawasi rencana organisasi sektoral dalam menangani permasalahan kebijakan publik yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu organisasi saja

Pencapaian kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil atau alternatif, negasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang baik. Terjadinya kolaborasi sangat penting sebagaimana sarana dan praktik yang terlibat, motivasi para pelaku dan tujuan dari pihak yang terlibat (O'Flynn dan John, 2008: 03). Seperti halnya yang juga dikemukakan oleh Gray (Rahu, 2021). kolaborasi adalah suatu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah publik sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi yang melibatkan instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Balogh, dkk (2012:02) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor secara konstruktif yang berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak akan dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

METODE

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan sebuah gambaran mengenai *collaborative governance* dan pelayanan publik di Pelabuhan Andi Mattalata Barru, maka jenis dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek atau *setting* sosial yang dilaksanakan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data, yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi. (Satori dan Komariah, 2009: 28), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang *collaborative governance* dan pelayanan publik.

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak di rumusan masalah yaitu pelayanan publik berbasis *collaborative governance* di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan sebuah gambaran mengenai pelayanan publik dan *collaborative governance* dan

di Pelabuhan Andi Mattalata Barru, maka jenis dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek atau setting sosial yang dilaksanakan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data, yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi. (Satori dan Komariah, 2009: 28), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang *collaborative governace* dan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia saat ini membuka diri dari berbagai macam kemajuan yang dapat dinikmati, baik dari segi pelayanan pemerintahan maupun dari segi fasilitas pendukung yang sifatnya lebih maju. Pelayanan pemerintahan hari ini seharusnya sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempermudah kinerja pelayanan, namun terbatasnya keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu hambatan dari kurang berpesatnya pelayanan pemerintahan.

Salah satu langkah pemerintah dalam menangani hal demikian yaitu dengan menjalin kerja sama dalam berbagai pihak, yaitu dengan

menghadirkan unsur swasta dan keterlibatan dari masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan istilah *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan salah satu konsep dalam pelayanan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir.

Garongkong merupakan daerah pengembangan pelabuhan karena merupakan daerah pesisir yang ideal untuk hadirnya pelabuhan. Selaian daerah yang pesisir mendukung untuk hadirnya pelabuhan di sekitar Garongkong juga terdapat penahan ombak secara alamiah yaitu pulau Pannikiang. Namun pembangunan Pelabuhan Andi Mattalatta tidak terlalu berjalan dengan baik terbukti Pemerintah Daerah Kabupaten Barru terkendala di berbagai aspek dalam pembangunan sehingga pembangunan tersebut dilimpahkan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan membantu pihak Pemerintah Kabupaten Barru dalam penyelesaian pembangunan ke pelabuhanan, karena pemerintah kabupaten tidak mampu untuk membiayai diawal pembangunan sehingga pembangunan diawal dilimpahkan ke pemerintah pusat karna terkendala dalam hal pembiayaan diawal pembangunan.

Pada tahun 2010 bantuan Kementerian Perhubungan juga memberikan bantuan sebuah 1 unit kapal ferry sebagai mobilisasi awal di pelabuhan. Bantuan tersebut juga menjadi kapal ferry pertama untuk Pelabuhan Garongkong dalam melaksanakan penyeberangan laut pada tahun 2010 yang bertindak sebagai operator pelabuhan adalah Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTD atau Balai Transportasi Darat. Pada awal pembangunan UPTD Kepelabuhanan tidak melaksanakan tugas dengan baik karena terkait kewenangan. Kewenangan tersebut belum diserahkan oleh Kementerian Perhubungan karena masih merupakan asset kementerian perhubungan.

O'Leary, Bingham dan Gerard (Balogh, dkk,2012: 02) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* sebagai sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sektor swasta, publik dan masyarakat. Tata kelola kolaboratif dapat dianggap sebagai bentuk hubungan kerja sama pemerintah sebagai pelaku utama dan pihak swasta sebagai pihak pelaksana (Donahue dan Richard, 2021: 30). Penjelasan definisi *collaborative governance* lebih menjelaskan bahwa kolaborasi

merupakan alat untuk manajemen *stakeholder*.

Subarsono, dalam (Salsabila: 2016: 176) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* tidak hanya terbatas hanya pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya *multipartner governance* yang meliputi sektor privat atau swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran *stakeholder* dan penyusun rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya dengan kerjasama publik, privat, dan sosial.

Pendapat dari (Dwiyanto, 2010: 253) menjelaskan bahwa kerja sama kolaboratif sebagai suatu proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha untuk mencari solusi yang ditentukan secara mandalam dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya jika dikerjakan secara sendiri-sendiri.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Fosler (Dwiyanto, 2010: 253) Konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerja sama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang *intensif*, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *alignment* dalam tujuan, strategi,

agenda, sumber daya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun *shared vision* dan mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi, sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki masing-masing.

Salah satu cara mengukur suksesnya sebuah kolaborasi dijelaskan oleh Ansell & Gash dalam (Wibowo, 2020) mengemukakan beberapa tahapan untuk mengukur yaitu *Face to Face* (Dialog Tatap Muka) adalah jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian dan komitmen untuk proses. *Trust Building* (Membangun kepercayaan) merupakan fase terpisah dari dialog tatap muka dan negosiasi tentang masalah-masalah substantif, tapi pemimpin kolaboratif yang baik harus membangun kepercayaan diantara para penentang. *Comitment To Proseses* (Komitmen pada proses), *Share Understanding* (Pemahaman Bersama), *Intermediate Outcomes* (Dampak Sementara). Proses inilah yang kemudian dibahas dalam penelitian

tersebut yang menjadi tolak ukur kesuksesan dari sebuah kolaborasi.

Face to Face Dialogue

Face to face dialogue atau dialog tatap muka merupakan tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antar *stakeholders* karena dialog tatap muka ini berarti keterlibatan semua pihak dalam proses dialog secara langsung dan ikut berperan aktif dalam proses pembuatan setiap keputusan terkait dengan kepentingan bersama. Dalam dialog tatap muka sering terjadi perbedaan pandangan antara *stakeholders* karena masing-masing ingin memperkuat *stereotype*.

Namun dialog tatap muka tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi peluang yang saling menguntungkan dalam sebuah kolaborasi dan membangun kolaborasi efektif untuk mencapai konsensus bersama, seperti yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2007: 551) bahwa jika beberapa *stakeholders* tidak memiliki kapasitas, organisasi, status atau sumber daya untuk berpartisipasi dengan *stakeholders* yang lain, maka proses *Collaborative Governance* akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat.

Permasalahan awal dari dialog tatap muka ini sering terjadi sering terjadi perbedaan pandangan antara *stakeholders* karena masing-masing ingin memperkuat *stereotype*. *Stereotype* atau Prasangka yang didasarkan pada penilaian ataupun anggapan yang berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Makna karakteristik tersebut yaitu tersebut meliputi jenis kelamin, ras, suku bangsa, dan keterampilan komunikasi yang dimiliki seseorang atau kelompok sosial.

Tahapan ini merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian dan komitmen untuk proses. Suksesnya kolaborasi dimulai dengan berhasilnya tahap pertama ini begitu juga dilakukan diawal pembangunan Pelabuhan Andi Mattalatta. Diawal pembangunan pelabuhan para *stakeholder* yang berkepentingan bertemu antara lain, Kementrian Perhubungan dalam hal ini diwakili oleh Kesyabandaran didampingi oleh Bupati Barru bertemu dengan masyarakat Garongkong membicarakan tentang rencana pembangunan pelabuhan dan rencana kerja sama, dan hasil dari dialog tersebut melahirkan beberapa keputusan.

Pelabuhan Andi Mattalata mendapat respon baik dari masyarakat dan masyarakat diizinkan untuk membuat koperasi tenaga kerja bongkar muat sebagai satu-satunya tenaga kerja yang memberikan jasa bongkar muat. Namun seiring berjalannya waktu terjadi kendala dalam pembentukan koperasi terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah Kabupaten Barru dengan masyarakat Garongkong dimana pemerintah ingin membentuk koperasi yang beda dari yang dibuat oleh masyarakat Garongkong. Hal tersebut sempat menjadi dinamika di masyarakat, namun masyarakat Garongkong berjuang dan berhasil memenangkan di pengadilan.

Permasalahan diawal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ansell & Gash (2007: 551) bahwa jika beberapa *stakeholders* tidak memiliki kapasitas, organisasi, status atau sumber daya untuk berpartisipasi dengan *stakeholders* yang lain, maka proses *Collaborative Governance* akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Sesuai dengan hasil wawancara penulis melihat bahwa pada saat sosialisasi awal berlangsung kondisi masyarakat Garongkong masih jauh kapasitas pengetahuannya dibanding dengan pemerintah, baik dari segi ilmu maupun dari segi pengalaman.

Sehingga saat diawal pembentukan TKBM sebagai wadah awal untuk masyarakat bisa bekerja dengan resmi pemerintah dalam bersama-sama mengelola pelabuhan itu terjadi masalah.

Pemerintah yang semestinya sebagai fasilitator awal kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, justru membuat permasalahan dengan berencana membuat TKBM dengan diinisiasi oleh pemerintah artinya tidak dikelola oleh masyarakat Garongkong secara independent.

Trust Building

Trust building atau membangun kepercayaan antar *stakeholders* bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama. Membangun kepercayaan merupakan salah satu hal yang sangat sulit ditumbuhkan dalam proses awal kolaborasi diantara para *stakeholders*. Hal tersebut dikarenakan bahwa membangun kepercayaan itu proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama. kurangnya kepercayaan sering jadi alasan gagalnya sebuah kolaborasi.

Sulitnya kerja antara *stakeholder* itu sangat susah apalagi melihat kondisi awal kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barru

dengan Masyarakat Garongkong. Sejarah permasalahan awal tersebut akan susah kedepannya bagi pihak yang bekerja sama dalam membangun sebuah kerja sama. Sebagai temuan penelitian belum ada kerja sama yang pasti antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan koperasi TKBM *Simaturue*.

Ketidakpastian hukum menjadi salah satu kendala dalam kolaborasi karna prinsip dari *collaborative governance* menurut United Nation Development Program (UNDP, 1997) adalah salah satunya adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini menjadi sangat penting dalam kerja sama karna merupakan landasan dalam bekerjasama. Ketidakpastian hukum juga dijelaskan oleh Hairuddin sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas Kepelabuhanan yaitu kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan pihak TKBM adalah salah satu bentuk kerja sama Nonformal karena belum ada perjanjian secara formal diatas kertas seperti dokumen kerja sama antara *stakeholdes* yang berkepentingan. Namun terlihat inisiasi pemerintah dalam membangun kepercayaan ke masyarakat terlihat dengan mempekerjakan anggota dari TKBM untuk bekerja di pelabuhan dalam

memberikan pelayanan terhadap penumpang.

Commitment to Process

Commitment to process atau komitmen terhadap proses langkah dalam pelaksanaan kolaborasi karna dibutuhkan rasa saling ketergantungan antar *stakeholders* untuk menyelesaikan permasalahan. Proses pembangunan komitmen tersebut sudah terjadi pada saat dialog tatap muka antar *stakeholders* harus membuat prosedur musyawarah dan negosiasi yang berintegritas. Hal tersebut dikarenakan prosedur yang jelas, adil, dan transparan dinilai sangat penting dalam sebuah komitmen dalam kolaborasi. Komitmen juga memerlukan kepercayaan agar antar para *stakeholders* saling berbagi tanggung jawab dan berjalan dengan baik. Adanya komitmen mampu menghilangkan penghambat yang seringkali muncul akibat perbedaan karakteristik dan kepentingan antar *stakeholders*. Proses pembangunan komitmen didialog awal sangat berpengaruh pada tahap ini dalam membangun komitmen. Komitmen awal yaitu masyarakat sekitar akan mendapat lapangan pekerjaan di pelabuhan sudah terbukti dengan adanya kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan pihak

TKBM walaupun dengan kerjasama Nonformal.

Pemerintah membutuhkan juga support masyarakat setempat dalam menjalankan pelayanan di pelabuhan. Dapat disimpulkan bahwa bukan cuma masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di pelabuhan namun pihak pemerintah juga dalam hal ini Dinas Perhubungan membutuhkan bantuan masyarakat sekitar sebagai penyedia jasa bongkar muat di pelabuhan. Terjadi saling membutuhkan antara *stakeholders* yang berkepentingan. Seperti yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2007) komitmen terhadap proses langkah dalam pelaksanaan kolaborasi karna dibutuhkan rasa saling ketergantungan antar *stakeholders* untuk menyelesaikan permasalahan. Penyelesaian masalah diawal dalam pembentukan TKBM ini dapat diselesaikan dengan tetap berkolaborasi walapun dalam beberapa pengaruh-pengaruh intervensi politik seperti yang dijelaskan oleh Connick dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan kolaborasi yaitu salah satu pemecahan masalah yang melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat. penjelasan diatas terjadi di *stakeholders* yang berkepentingan di pelabuhan Garongkong mereka menyampingkan ego *history* demi kepentingan bersama kedepannya.

Share Understanding

Share understanding atau pemahaman bersama adalah tahap setiap *stakeholders* untuk mengembangkan pemahaman bersama untuk mencapai tujuan bersama. Berbagi pengertian dan pemahaman dalam sebuah kolaborasi merupakan sebuah kolaborasi merupakan sebuah kolaborasi merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Pemahaman bersama juga bisa menyiratkan kesepakatan mengenai pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Para *stakeholders* menyetujui tujuan dan nilai yang disepakati bersama, dengan begitu akan menimbulkan partisipasi aktif dari para *stakeholders* dengan arah tujuan bersama.

Tahap ini merupakan pengecualian dari penelitian ini karna sesuai penjelasan sebelumnya bahwa pihak yang bekerjasama dalam hal ini dinas perhubungan belum memiliki kerja sama secara formal dalam artian memiliki dokumen kerja sama yang sah antara dinas perhubungan dengan TKBM namun mereka cuman bekerja sebagai buruh lepas yang hanya bekerja sama dengan penumpang atau pihak lain yang mempunyai kepentingan

tertentu dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat.

Pihak lain bekerja sama antara lain perusahaan bongkar muat yang sifatnya kontrak muatan per kapal. Barang yang dibongkar muat tersebut merupakan logistik atau material dan lain-lain.

Intermediate Outcomes

Intermediate outcomes atau hasil sementara merupakan tahap tujuan yang akan dicapai. Hasil dari proses kolaborasi berupa *output* atau keluaran yang nyata dianggap sebagai kritis yang penting untuk membangun momentum sehingga dapat mengarahkan pada keberhasilan kolaborasi.

Dampak dari Pembangunan Pelabuhan Andi Mattalata sudah menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat Garongkong. Yang dulunya cuman berfokus di profesi nelayan dengan petani sekarang sudah mempunyai pekerjaan tambahan. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal supaya terciptanya masyarakat yang lebih maju dan kesejahteraan. Walaupun status dengan pemerintah daerah dengan pihak koperasi masih dalam status nonformal namun kesejahteraan masyarakat sudah mulai terlihat.

Kesejahteraan masyarakat Garongkong walaupun sudah mulai meningkat dari sebelum adanya pelabuhan Andi Mattalata dan setelah adanya pelabuhan, namun dengan biaya hidup juga yang terus bertambah maka pendapatan juga dianggap masih kurang.

Pekerjaan Bongkar Muat tidak terlepas dari penumpang yang ingin menggunakan jasa tenaga kerja bongkar muat. Pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak Koperasi TKBM *Simaturue* ke penumpang yaitu seperti membantu mengangkat barang bawaan penumpang ke kapal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelayanan publik berbasis *collaborative governance* di Pelabuhan Andi Mattalatta Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut kendala teknis terjadi karena proses komitmen awal tidak berjalan dengan baik yang diakibatkan dari tidak konsisten dengan pembicaraan awal di tahap *face to face* sehingga menghambat dalam keberlangsungan kerja sama antara *stakeholders* yang bekerja sama dalam melakukan pelayanan penumpang dan barang, namun hal tersebut bisa diminimalisir oleh faktor emosional yang terjadi oleh pihak yang bekerja sama sehingga

pelayanan dapat berjalan walaupun tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4).
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200-210.
- Dwimawanti, I. H. (2004). Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah. *DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(1).
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Emerson, K. et. a. (2001). Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Freeman, J. (1997). Collaborative governance in the administrative state. *UCLA L. Rev.*, 45, 1.
- Gurning, R. O. S., & Budiyanto, E. H. (2007). *Manajemen bisnis pelabuhan*. Jakarta: APE Publishing.
- Hartman, C., et al. (2002). Environmental Collaboration: Potential and Limits. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds. *Kluwer Academic*

- Publishers. And, Cordery, J., (pp.21-40) (Partnership and Leadership Building Alliances for a Sustainable Future).*
- Humang, W. P., Jinca, M. Y., & Salamah, U. (2013). Prospek Pelabuhan Bitung Sebagai Simpul Utara Koridor Ekonomi MP3EI Sulawesi. *Warta Penelitian Perhubungan*, 25(2), 96-103.
- Irawan, D. (2017). Collaborative governance (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 363-375
- LUMANSIK, D. P., LENGKONG, F. D., & PLANGITEN, N. (2019). Efektivitas Sistem Birokrasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. California: Sage.
- Motik, C., Sitompul, I., Tomo, H. S., Navy, N. J. W., Harya, B., & Armansyah, M. (2007). Kekayaan negeriku negara maritim. *Jakarta: Sekertariat Dewan Maritim Indonesia*.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1993). *Peran Masyarakat Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rahmadana, Dkk. (2020). *Pelayanan Publik* (Ed. Revisi): Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 13-24.
- Salsabila, U. (2018). Smart Community Governance Dalam Program Geopark Ngarai Sianok di Kota Bukitting. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 109-124.
- Satori, D. A., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: alfabeta. 22.
- Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono, P. D. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Susniwati, S., & Kurhayadi, K. (2020). Kolaborasi Tata Kelola Program BPJS Dalam Penanggulangan Defisit Program BPJS di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 349-359
- Triatmodjo, B. (2010). Perencanaan pelabuhan. *Yogyakarta: Beta Offset*.
- Undang- undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Wibowo, A. N. F. A. (2020). *Collaborative governance dalam pelayanan transportasi publik (study BRT Trans Semarang)*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 1-18.
- Zainuddin, M. (2019). Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Pt. Astra Agro Lestari Dalam Peningkatan Produksi Petani Kelapa Sawit Di Mamuju Tengah. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 4(1), 13-19.